



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT UTAMA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **NUR TRI ARIES SUESTININGTYAS**
2. Jabatan : **SEKRETARIS UTAMA**
3. NHK : **232405**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **4.215.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 154 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 176 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
6. Tanah Seluas 7350 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m2/320 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/170 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **452.000.000**

1. MOBIL, PAJERO SPORT MOBIL PENUMPANG Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



3. MOBIL, HONDA MOBIL PENUMPANG Tahun 2018, HASIL  
SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	139.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	112.852.156
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.898.122.161
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.816.974.317
III. HUTANG	Rp.	142.121.017
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.674.853.300

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.